OMBUDSMAN DIY DORONG KESIAPSIAGAAN INFRASTRUKTUR JALAN HADAPI MUSIM HUJAN DAN NATARU

Senin, 23 November 2026 - diy

Yogyakarta - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan rapat koordinasi kesiapsiagaan penanganan kerusakan jalan di wilayah DIY dalam menghadapi musim hujan serta perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (20/11/2026) ini menjadi forum komunikasi dan dialog bersama para pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan infrastruktur jalan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DIY, Muflihul Hadi beserta jajaran keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Pemeriksaan Laporan, dan Pencegahan Maladministrasi. Turut hadir perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, serta dinas yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, serta Gunungkidul.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DIY, Muflihul Hadi menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini diharapkan menjadi ruang komunikasi dan dialog antara Ombudsman dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Menurutnya, memasuki musim hujan, kondisi jalan yang rusak dan berlubang perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kami berharap ini adalah acara yang tepat sebagai forum komunikasi dan dialog bersama antara Ombudsman dengan pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan penyediaan infrastruktur jalan. Karena kita sudah memasuki musim hujan dan tentu akan berdampak pada infrastruktur kita. Banyak jalan rusak dan berlubang. Ombudsman hadir untuk memastikan jangan sampai infrastruktur yang rusak itu kemudian menimbulkan korban bagi masyarakat," ujar Muflihul Hadi.

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pengelola jalan memaparkan kondisi infrastruktur, tingkat kemantapan jalan, kegiatan pemeliharaan, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Pembahasan mencakup jalan nasional, jalan provinsi, hingga jalan kabupaten/kota di wilayah DIY.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, kondisi kemantapan jalan nasional di DIY pada semester I tahun 2026 mencapai 98,94%. Sementara itu, tingkat kemantapan jalan provinsi berada pada angka 69,78%. Adapun kondisi jalan kabupaten di masing-masing wilayah masih bervariasi dan memerlukan perhatian, terutama pada ruas yang mengalami kerusakan ringan maupun berat.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah kesiapan pengelola jalan menghadapi peningkatan risiko kerusakan akibat curah hujan, seperti jalan berlubang, permukaan jalan bergelombang, genangan air, hingga longsor. Selain itu, sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan juga menjadi bagian dari pembahasan sebagai langkah antisipasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Tri Murtoposidi menyampaikan bahwa langkah antisipasi yang disiapkan meliputi pendataan kondisi jalan secara langsung di lapangan serta pemasangan rambu peringatan pada lokasi yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Antisipasinya, kami lebih ke pendataan lapangan, pemasangan rambu-rambu, seperti awas jalan berlubang, awas jalan bergelombang, dan awas rawan longsor. Itu yang akan kami lakukan dalam rangka menghadapi musim hujan dan Nataru," ungkap Tri Murtoposidi.

Selain pendataan dan pemasangan rambu, masing-masing instansi juga menyampaikan kesiapan pemeliharaan rutin, penyediaan material penanganan kerusakan, pembersihan saluran drainase, serta koordinasi penanganan apabila terjadi kerusakan yang membutuhkan penanganan lintas kewenangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan memastikan kondisi jalan tetap mendukung mobilitas masyarakat.

Aspek pengelolaan pengaduan masyarakat turut menjadi pembahasan penting dalam rapat koordinasi. Para pengelola jalan menyampaikan berbagai kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, di antaranya aplikasi Jalan Kita, SP4N-LAPOR!, Lapor Sleman, serta kanal pengaduan resmi lainnya. Pengaduan yang diterima selanjutnya akan diverifikasi, diteruskan kepada instansi sesuai kewenangannya, dan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi kerusakan serta ketersediaan anggaran dan material.

Ombudsman DIY juga mengajak masyarakat untuk ikut memperhatikan kondisi jalan di sekitarnya, terutama selama musim hujan. Jika menemukan jalan berlubang, bergelombang, atau kerusakan lain yang bisa membahayakan pengguna jalan, masyarakat bisa langsung melaporkannya ke instansi terkait atau Ombudsman DIY.

Melalui diskusi tersebut, Ombudsman DIY juga mendorong setiap instansi untuk memperkuat koordinasi dan memastikan ketersediaan informasi pendukung, termasuk data kondisi jalan, peta ruas berdasarkan kewenangan, serta person in charge (PIC) yang dapat dihubungi untuk mempercepat komunikasi dan tindak lanjut pengaduan.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Ombudsman DIY dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan. Dengan kesiapsiagaan dan koordinasi yang baik, penanganan kerusakan jalan diharapkan dapat dilakukan secara lebih responsif sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan publik tetap menjadi prioritas, khususnya menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru.